

Analisis Satuan Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran

2010/2011

ABSTRAK

NI LUH KADEK SUPARTINI. Analisis Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011. Tesis. Singaraja: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 2012

Tesis ini sudah dikoreksi dan diperiksa oleh Pembimbing I: Prof. Dr. Gde Anggan Suhandana. dan Pembimbing II: Prof. Dr. Nyoman Natajaya

Kata kunci: Satuan biaya, standar pendidikan nasional, mutu pembelajaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) besaran satuan biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, (2) besarnya satuan biaya pendidikan (unit cost) SMA Negeri 1 Sukawati dan persiswa serta satuan biaya pendidikan lainnya, (3) peningkatan biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati disertai meningkatkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan (4) korelasi antara standar biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran guru. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah, guru sebagai tenaga pendidik (edukatif), serta tenaga kependidikan lain pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 89 orang. Karena perhitungan analisis biaya menggunakan semua populasi, maka semua populasi dipakai sebagai subjek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisis biaya dan analisis korelasi untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antara standar biaya pendidikan dengan mutu pembelajaran guru.

Hasil analisis ditemukan : (1) satuan biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati Rp. 5.157.347.900 dan satuan biaya pendidikan per siswa Rp.6.683.151,74 tahun 2010/2011 sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan bantuan, (2) Penggunaan dana terbesar untuk biaya operasional kedua untuk biaya operasional, non personal dan ketiga untuk biaya investasi, bea siswa dan bantuan. Dana masyarakat menjadi sumber andalan untuk menggerakkan kegiatan sekolah, (3) Terjadi peningkatan biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2010/2011, (4) terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran melalui persamaan garis regresi $\hat{Y} = 111,074 + 0,804X$ dengan kontribusi 53,10%.

ABSTRACT

NI LUH KADEK SUPARTINI Unit Cost Analysis of Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati Academic Year 2010/2011. Thesis. Singaraja: Graduate School of Education Ganesha University, year 2012.

This thesis has been corrected and verified by the Advisors I: Prof. Dr. Gde Anggan Suhandana. and Advisors II: Prof. Dr. Nyoman Natajaya

Keywords: Unit cost, National Education Standards, the quality of learning.

This study aims to determine: (1) tuition units SMA Negeri 1 Sukawati are sourced from the government, local government, and society in the fulfillment of the eight national education standards (2) the unit cost of education (unit cost) SMA Negeri 1 Sukawati and unit costs per student and other education, (3) increase in education costs SMA Negeri 1 Sukawati accompanied improve the achievement of National Education Standards, and (four) correlation between the *Standard* of education costs with increased quality of teaching teachers. The subjects in this study are all students, teachers as educators (educational), and other educational staff at the High School (High School) State 1 Sukawati year 2010/2011 which amounted to 89 persons. Because the calculation of cost analysis using all populations, all populations are used as research subjects. Data analysis: used descriptive analysis to analyze the costs and correlation analysis to determine whether there is any correlation between the Standard of education costs with the quality of teaching teachers.

The analysis finds: (1) the unit cost of education SMA Negeri 1 Sukawati Rp.5.157.347.90 and the unit cost of education per student Rp.6.683.151, 74 year 2010/2011 (2) sources of funding from central government, Local Government and the aid community, (3) the use of the largest funds for operational expenses, person, to two for the operating costs of non personal, to three for investment scholarships and assistance. Dependable source of public funds to drive school activities. (4) an increase in educational costs SMA Negeri 1 Meng 24.20% can enhance the achievement of National Education Standards in 2010/2011, and (4) there is a positive and significant correlation between the competence of teachers for the quality of teacher learning through equation of regression line = $119.074 + 0.804 X$ with a contribution of 53.10%

Latar Belakang Penelitian

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia agar siap menghadapi segala macam tantangan dalam persaingan global. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat memberikan sumbangan nyata terhadap kemajuan pembangunan suatu bangsa. Dimana Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan seseorang di kemudian hari, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan bangsa. Untuk itu peningkatan mutu pendidikan mutlak diperlukan dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan lebih cepat. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah menetapkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah. Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menetapkan tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, merupakan ujung tombak dan paling menentukan dalam menciptakan suatu generasi yang mampu menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini. Beberapa indikator yang esensial yang sangat menentukan mutu sekolah sebagai *input* antara lain siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan.

Salah satu masalah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah beragamnya mutu pendidikan di setiap tingkat dan jenis unit pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003,

dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Pemerintah memprogramkan pada tahun 2013 semua sekolah di Indonesia telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas mendasari peneliti untuk meneliti tentang "Analisis Satuan Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011".

Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan mengungkap analisis biaya pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati dalam usaha memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Secara spesifik dari latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat orang tua murid SMA Negeri 1 Sukawati memiliki pandangan terhadap biaya pendidikan berbeda-beda yaitu biaya pendidikan sebagai Investasi dan biaya

- pendidikan dipandang sebagai konsumsi
2. Biaya pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati setiap tahun kecenderungannya meningkat.
 3. SMA Negeri 1 Sukawati berkewajiban untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan
 4. SMA Negeri 1 Sukawati belum memiliki Total biaya (*total cost*) yang diperlukan untuk membiayai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
 5. SMA Negeri 1 Sukawati belum memiliki Satuan biaya pendidikan (*unit cost*) rata-rata per siswa per tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan pemenuhan standar nasional pendidikan
 6. SMA Negeri 1 Sukawati belum mengetahui Biaya Tak Langsung yang perlu disediakan per siswa untuk mengikuti penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2010/2011.
 7. SMA Negeri 1 Sukawati belum mengetahui adanya korelasi antara peningkatan Biaya pendidikan terhadap peningkatan kualitas pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.
 8. SMA Negeri 1 Sukawati belum mengetahui Korelasi antara peningkatan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran guru.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas untuk menganalisis dan mengetahui (*unit cost*) biaya rata-rata untuk jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati. Objek studinya pada biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Juga mengetahui manfaat biaya untuk pemenuhan standar sekolah hubungannya dengan prestasi peningkatan mutu pembelajaran.

LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Deskripsi Teori

Sebelum membahas tentang masalah biaya pendidikan secara komprehensif maka ada beberapa pokok pikiran yang perlu dikemukakan di sini, antara lain; Pendidikan akan dapat menambah kemampuan individu, masyarakat, negara dan bangsa. Biaya pendidikan dipandang sebagai jumlah uang yang ditanamkan dalam jumlah modal manusia (*human capital*). Berdasarkan pokok pikiran di atas investasi yang dilakukan dalam pendidikan akan memperoleh manfaat (*cost benefit*) dan pendapatan neto atau *rate of return* yang lebih besar di masa yang akan datang. (<http://matsofa.wordpress.com>). Biaya dan kualitas pendidikan mempunyai keterkaitan yang sangat erat, dimana biaya pendidikan yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran (Fattah, 2000). Kualitas pendidikan merupakan fungsi dari sejumlah faktor seperti; *input*, *process*, dan *output*. Biaya pendidikan yang digunakan untuk menyediakan perangkat *input* akan memberikan dampak terhadap kualitas melalui fungsi alokasi yang tepat, adil, dan pendayagunaan biaya secara efektif dan efisien (Bank Dunia, 1995). Biaya merupakan salah satu di antara sejumlah faktor penentu terbentuknya kualitas pendidikan yang berfungsi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Oleh karena itu faktor biaya tidak dapat dihindarkan apalagi diabaikan (Rindjin, 2007). Tiap lembaga pendidikan diupayakan untuk mampu memanfaatkan dana untuk menghasilkan mutu pendidikan yang dibutuhkan

masyarakat. Untuk itu lembaga pendidikan diharapkan mampu menggali dana untuk menghasilkan output yang mampu memposisikan pendidikan sebagai penggerak dan lokomotif dari pembangunan (*engine of growth*). Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan inovasi, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan pembangunan sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi, bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. (<http://www.massofa.wordpress.com>)

1. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, perolehan, pengalokasian dan pengelolaan biaya pendidikan merupakan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*). Selanjutnya biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya (*cost*) yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang) misalnya iuran siswa, sama fisik dan buku (Dedi Supriadi, 2003).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu pembiayaan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat pada satuan pendidikan. Selanjutnya pembiayaan satuan pendidikan merupakan biaya secara keseluruhan (*total cost.*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*), dalam kaitannya dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

2. Sumber Biaya Pendidikan

Sumber pembiayaan merupakan ketersediaan sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggaraan pendidikan.

Sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan) dilihat dari tataran makro atau nasional berasal dari (1) pendapatan Negara dari sektor pajak yang beragam jenisnya (2) pendapatan dari sektor non pajak seperti hasil pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya seperti hasil hutan, hasil kelautan, gas dan non migas. (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa (4) usaha-usaha negara lainnya termasuk hasil investasi saham pada Perusahaan Negara, BUMN, BUMD, Industri, Pariwisata serta (5) bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri dari lembaga keuangan internasional seperti UNESCO, UNICEF, BANK DUNIA seperti Asian Development Bank (ADB), Internasional Moneter Fund (IMF), International Development Bank (IDB), maupun pemerintah luar negeri melalui kerjasama multilateral dan bilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dana pendidikan dari pemerintah pusat disalurkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk pemberian *block grant* atau hibah digunakan untuk fisik dan non fisik. Hibah untuk pembangunan fisik dapat dimanfaatkan untuk

a. Sekolah SMA/SMK berupa Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru, BIS Perpustakaan, BIS Laboratorium IPA, BIS Laboratorium Komputer, BIS Ruang Kelas baru (RKB), Peralatan Teknologi Informasi Komputer (TIK), Ruang Pusat Sumber Belajar (PSB) dan Asrama Siswa.

b. Sekolah SD dan SMP berupa Widyakrama, yaitu subsidi ruang laboratorium dan alat IPA, subsidi ruang bahasa dan komputer beserta perlengkapannya, subsidi ruang perpustakaan dan buku, subsidi sarana dan prasarana olahraga dan seni, subsidi asrama dan mes guru untuk daerah terpencil, rehabilitasi gedung, pengembangan sekolah berstandar

nasional, sekolah koalisi, sekolah berwawasan internasional dan keunggulan daerah.

Hibah atau *Block grant* non fisik dapat berupa:

a. *Block Grant Broad Based Education* (BBE) untuk *life skill* di SD/ SMP (misalnya seni tari, seni ukir, anyam-anyaman, komputer, dan lain sebagainya), SMA/ SMK (seni ukir, komputer, tata boga, dan lain sebagainya).

b. *Block Grant* Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk SMA dan SMK

c. Biaya *pembinaan* Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Sekolah Kategori Mandiri (SKM) dan pembinaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

d. Bantuan *Khusus* Murid (BKM), berupa beasiswa untuk SD, SMP dan SMA

3 Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: (1) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; dan (2) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya (Draf Standar Pembiayaan Pendidikan, 2007).

4. Biaya Pendidikan di Sekolah

Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 dalam pasal 3, biaya pendidikan meliputi (a) biaya satuan pendidikan (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan (c) biaya pribadi peserta didik. Di tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan atau sekolah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, seperti lahan berupa tanah, dan biaya investasi selain lahan merupakan barang dan alat yang dipakai lebih dari sekali dan umurnya lebih dari setahun seperti gedung, Ruang kelas belajar, Laboratorium. Peralatan kantor, Sarana pembelajaran, Peralat . Biaya yang dikeluarkan untuk membeli tanah memang merupakan unsur biaya investasi, tetapi harga tanah tidak diperhitungkan dalam biaya pendidikan, karena tanah dianggap tidak mengalami penyusutan. Tetapi kalau menyewa tanah, maka sewanya tiap tahun diperhitungkan sebagai biaya pendidikan. Sementara untuk biaya bangunan, taman, fasilitas olahraga, peralatan dan perlengkapan, perabot dan mebel, serta buku teks, buku sumber bacaan, dihitung nilai taksiran penyusutannya tiap tahun sebagai komponen biaya penyusutan investasi.

Biaya operasional adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang habis digunakan dalam waktu satu tahun atau kurang per siswa per tahun. Biaya operasional dapat dipilah menjadi biaya operasional personil dan biaya operasional bukan personil. Biaya operasional personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah yang digunakan untuk kesejahteraan personil atau sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan personil (SDM) sekolah. Kesejahteraan

personil mencakup gaji, tunjangan, kesejahteraan, transportasi termasuk perjalanan dinas, seragam, kelebihan jam mengajar atau kerja, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Adapun personil (SDM) sekolah tersebut adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru letap pegawai negeri sipil (PNS), guru honorer, guru diperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tata usaha (TU), pesuruh sekolah, satpam, tenaga laboratorium atau bengkel, pegawai perpustakaan, dan pengurus komite sekolah. Pengembangan personil (SDM) meliputi lokakarya, seminar, magang, pelatihan, penataran, dan pendidikan untuk personil. 1 Sebenarnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 biaya pengembangan personil/SDM termasuk biaya investasi/*capital!* modal karena penggunaan atau pemanfaatan hasil pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebih dari satu tahun. Namun, karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilai riil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasional. Biaya satuan pendidikan operasional bukan personil meliputi seluruh pengeluaran sekolah selain yang dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraan guru dan staf di sekolah. Komponen biaya ini mencakup biaya-biaya sebagai berikut: (1) Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) meliputi alat Tulis Kantor dan alat PBM. (2) Buku-buku meliputi buku pegangan guru, buku untuk siswa dan perpustakaan (3) Biaya Alat dan Bahan Habis Pakai terdiri dari bahan praktek, alat-alat Praktek, LKS (Lembar Kerja Siswa), alat kebersihan, alat Listrik, dan kebutuhan rumah tangga sekolah. (4) Biaya Daya dan Jasa meliputi listrik, telepon, air, internet dan gas. (5) Biaya Perbaikan Ringan dan Pemeliharaan untuk gedung, alat /Utilitas dan perabot. (6) Biaya Pembinaan Siswa terdiri dari Pramuka, Kegiatan OSIS, Masa Orientasi Siswa (MOS), Kegiatan

Olimpiade, Lomba-lomba, LPIP (Lomba Penelitian Ilmiah Pelajar)/LKIR (Lomba Karya Ilmiah Remaja), PIB (Pembinaan Intensif Belajar)/Bimbingan Belajar (BIMBEL), kegiatan Keagamaan, Peringatan Perayaan Hari Besar Keagamaan (PHBK), Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan dan Penyuluhan/ Bimbingan Karier/Bursa Kerja Khusus, Olahraga, Kesenian dan Palang Merah Remaja/PMR. (7) Biaya Hubungan Industri (HI) yaitu Sinkronisasi Kurikulum, Koordinasi Hubungan Industri, Pelaksanaan Praktek Kerja Industri, dan Uji Kompetensi, (8) Biaya Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Pelaporan, dan (9) Biaya Rapat yaitu Pendukung perlengkapan rapat dan konsumsi serta (10) Biaya Operasional Komite Sekolah (BNSP, 2007) Tidak semua kriteria yang ada dalam penilaian akreditasi sekolah mencerminkan pelayanan langsung kepada siswa, karena ada beberapa hal yang merupakan kegiatan administrasi. Pengklasifikasian berdasarkan akreditasi, sekolah dengan predikat A (Amat baik), B (Baik) dan C (cukup).

5. Standar Pembiayaan Sekolah Standar

Pembiayaan sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua siswa, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif dengan analisis korelasional. Secara

epistemologis pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan *objektivisme* dan *subjektivisme*.

2. Populasi dan sampel Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru sebagai tenaga pendidik (edukatif), pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 67 orang.

3. Pengujian Persyarat Analisis

Statistik yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana. Persyarat yang berkaitan dengan teknik analisis tersebut harus dibuktikan secara statistik. Adapun uji persyarat analisisnya adalah sebagai berikut.

1) Uji Normalitas Sebaran Data

Uji normalitas sebaran data dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran frekuensi skor pada setiap variabel berdistribusi normal sehingga statistik korelasional dapat digunakan. Untuk itu dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria: Jika $p > 0,05$ sebaran datanya berdistribusi normal, sebaliknya jika $p < 0,05$ sebaran datanya tidak normal. Perhitungan dilakukan dengan bantuan komputer melalui program SPSS 16.0

2). Uji Linieritas Garis dan Keberartian Koefisien Regresi

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variable terkait dengan masing-masing variabel bebas. Pedoman untuk melihat kelinieran adalah dengan mengkaji lajur *Dev. From linierity* dari modul MEANS, sedangkan untuk melihat keberartian arah regresinya berpedoman pada lajur *linierity*. Statistik yang dihasilkan dari modul tersebut adalah statistic F. Bila $F > F_{table}$ dengan $p > 0,05$ maka bentuk regresinya linier, dan sebaliknya jika $p > 0,05$ maka regresinya tidak linier. Bila $F < F_{table}$ dengan $p < 0,05$ maka koefisien regresi yang diperoleh signifikan dan bila $p > 0,05$ maka

koefisien regresi yang diperoleh tidak signifikan. Untuk menguji linieritas dan keberartian koefisien regresi digunakan program SPSS 16.0

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pertama, dan kedua dianalisis dengan analisis deskriptif, sedangkan hipotesis ketiga digunakan teknik analisis regresi sederhana dengan rumus :

$$\hat{Y} = a + bX \quad (\text{Sudjana, 1996:312})$$

Untuk menguji signifikan garis regresi di atas, digunakan rumus :

$$F_{reg} = \frac{RK_{reg}}{(dk) - 1} \quad \text{dengan derajat kebebasan } (dk) = (n - 2)$$

Kaidah keputusannya adalah: dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ dan $dk = 1: (n - 2)$, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($p < 0,05$), maka garis regresi tersebut signifikan, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($p > 0,05$), maka garis regresi tidak signifikan. Untuk keperluan analisis digunakan program SPSS 16.0

Untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan yang terjadi antara variable bebas dengan variabel terikat digunakan korelasi *product moment* dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad (\text{Sudjana, 1996:369})$$

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi nilai r tersebut, kemudian konsultasikan dengan nilai r_{tabel} Kaidah keputusannya adalah: dengan menggunakan taraf signifikansi 95%, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka H_0 ditolak, berarti signifikan, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka H_0 diterima, berarti tidak signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang mencakup deskripsi tentang karakteristik masing-masing variabel penelitian, Hasil

penelitian yang dimaksudkan adalah menyangkut deskripsi analisis biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati

1. Data Sumber Dana SMA Negeri 1 Sukawati

Dalam pengelolaan keuangan sekolah diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Suatu RAPBS berisikan rencana sumber dana dan rencana penggunaan dana RAPBS SMA Negeri 1 Sukawati memiliki sumber dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Dana Masyarakat, dan bantuan.. Dalam tahun pelajaran 2009/2010 sumber dana SMA Negeri 1 Sukawati yang diterima melalui buku kas umum Rp. 1.981.950.000, terdiri dari dana pemerintah pusat Rp. 200.000.000, dari Pemerintah Daerah Rp. 122.000.000, dan dana masyarakat Rp. 1.659.950.000. Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan untuk Bendaharawan komite Rp. 1.659.950.000, untuk investasi bangunan Rp. 180.000.000, dan untuk biaya operasi non personal Rp. 142.000.000. Jadi jumlah pengeluaran sejumlah dana yang masuk Rp. 1.981.950.000, (tabel 4.1). Bendaharawan Komite menerima dari kas umum Rp. 1.659.950.000 dicatat sebagai sumber penerimaan pada buku kas komite. Selain dari kas umum juga menerima dari Pemerintah pusat Rp. 3.980.000 dan dana pemerintah daerah Rp. 18.500.000 untuk bantuan Ujian Nasional, bantuan lomba UKS Rp. 5.520.000. Dari penerimaan Kas, Komite dimanfaatkan untuk investasi Rp. 492.980.000, biaya personal Rp.54.000.000 dan jam lebih Rp.302.400.000, untuk non personal Rp.814.267.900.000, serta untuk bantuan Rp.300.000.

2 Data Perkembangan Biaya Pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati

Rekapitulasi pendanaan SMA Negeri 1 Sukawati penggunaan dana tahun 2010/2011 diketahui untuk biaya Investasi sebesar Rp.672.980.000 atau

11,96 %, untuk biaya Personal Rp. 3.865.592.000, atau 68,72 %, untuk biaya Non Personal Rp. 96,267,000 atau 17,00 %, untuk biaya bantuan Rp.300.000 atau 0,01 dan biaya Bea Siswa sebesar Rp. 22..235.000 atau 0,40%. Jadi penggunaan dana terbesar yaitu untuk biaya operasi personal, kedua untuk investasi, ketiga biaya operasional Non Personal, Bea Siswa dan terakhir untuk bantuan. Jumlah biaya personal Rp. 3.865.592,000 terdiri dari Gaji Rp.3.090.140.000, atau 79,94%, tunjangan sertifikasi Rp.419.052.000 atau 10,84% dan kelebihan jam mengajar dari Kas Komite Rp.356.400.000 atau 9,22%. Jika dibandingkan penggunaan dana tahun 2009/2010 memiliki kesamaan komposisi dengan tahun 2010/2011 yaitu terbesar untuk biaya personal, ke dua untuk biaya investasi, ketiga untuk biaya non personal, ke empat untuk beasiswa dan terkecil untuk bantuan. Jadi biaya terbesar pada SMA Negeri 1 Sukawati adalah untuk biaya personal.

Selanjutnya jika dilihat dari segi jumlah penggunaan dana ada kenaikan sebesar Rp. 1.074.933,08 atau 24,20% yaitu dari pengeluaran Rp.4.442.441.819,- pada tahun 2007/2008 menjadi Rp. 5.517.374.900 tahun pelajaran 2010/2011. Adanya kenaikan penggunaan dana atau biaya pendidikan 24,20% diharapkan memiliki dampak peningkatan kualitas delapan standar nasional pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati atau peningkatan mutu pendidikan.

4 Data Biaya Pribadi Peserta Didik

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya pribadi ini juga disebut biaya tak langsung meliputi biaya buku tulis, biaya transport ke sekolah, biaya pakaian seragam, biaya jajan dan lainnya.

5 Data Biaya Operasional Personal

Dalam PP 48 tahun 2008 disebutkan biaya operasi sekolah terdiri dari Biaya operasional personal dan biaya operasi non personal. Biaya operasi personal terdiri dari biaya tenaga kependidikan dan biaya tenaga pendidik. Biaya tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Sukawati terdiri dari Gaji Pegawai tetap dan honorer dan insentif pegawai tetap dan honorer. Sedangkan biaya tenaga pendidik terdiri dari Gaji Guru, insentif Guru dan tunjangan sertifikasi guru dan jam lebih mengajar.

6 Data Standar Biaya Pendidikan

Data standar biaya pendidikan yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap responden menunjukkan bahwa skor tertinggi yang dicapai responden adalah 129 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai yaitu 150, sedangkan skor terendah yang dicapai responden adalah 85 dari skor terendah yang mungkin dicapai yaitu 30.

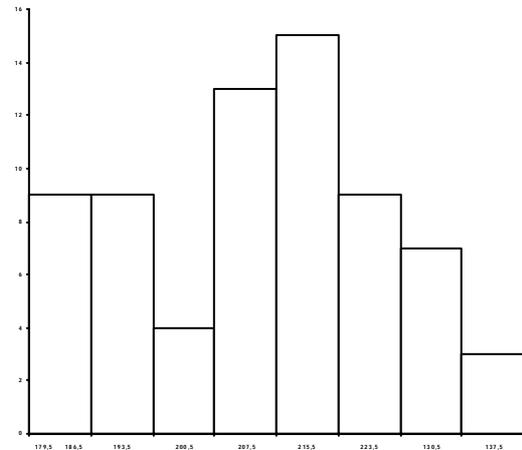
Untuk melihat kecenderungan standar biaya pendidikan pada SMA Negeri 1 Sukawati, terlebih dahulu dihitung mean ideal (M_i) dan standar deviasi ideal (SD_i). $M_i = V_i \times (\text{skor maksimal ideal} + \text{skor minimal ideal}) = \frac{1}{2} \times (150 + 30) = 90$. $SD_i = \frac{1}{6} \times (\text{skor maksimal ideal} - \text{skor minimal ideal}) = \frac{1}{6} \times (150 - 30) = 20$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya disusun konversi seperti berikut.

1. $\geq 120 \rightarrow$ Sangat baik
2. $100 \text{---} < 120 \rightarrow$ Baik
3. $80 \text{---} < 100 \rightarrow$ Cukup baik
4. $60 \text{---} < 80 \rightarrow$ Kurang baik
5. $< 60 \rightarrow$ Sangat kurang baik

7 Data Mutu Pembelajaran Guru

Skor mutu pembelajaran guru diperoleh dari hasil pengukuran terhadap responden menunjukkan bahwa skor tertinggi yang dicapai responden adalah 233 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai yaitu 320, sedangkan skor terendah yang dicapai responden adalah

180 dari skor terendah yang mungkin dicapai yaitu 64. dapat diamati bahwa pengelompokkan frekuensi terbanyak untuk variabel mutu pembelajaran guru (Y) terletak pada rentangan 208 sampai dengan 215 dengan frekuensi relatif sebesar 21,739%. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, distribusi frekuensi mutu pembelajaran guru dapat digambarkan dalam bentuk histogram sebagai berikut.



Dari hasil perhitungan tendensi sentral diperoleh nilai rata-rata sebesar 206,304 simpangan baku sebesar 14,975, modus 202, dan median 206

1. $\geq 256 \rightarrow$ Sangat baik
2. $213 \text{---} < 256 \rightarrow$ Baik
3. $171 \text{---} < 213 \rightarrow$ Cukup
4. $128 \text{---} < 171 \rightarrow$ Kurang
5. $< 128 \rightarrow$ Sangat kurang

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber dana pada SMA Negeri 1 Sukawati untuk tahun 2010/2011 berasal dari Pemerintah pusat Rp. 3.735.407.000 atau 66,40%, dari Pemerintah Daerah Rp. 140.500.000,00 atau 2,50%, dana masyarakat sebesar Rp. 1.659.950.000,00 atau 29,51% dan bantuan sebesar Rp. 5.520.000,00 atau 0,10%). Jadi bantuan dana pada

- SMA Negeri 1 Sukawati paling besar dari Pemerintah Pusat dan yang terkecil dari Pemerintah Daerah. Satuan biaya pendidikan (unit cost) SMA Negeri 1 Sukawati dalam tahun 2010/2011 sebesar Rp.5.517.347.900 dan satuan biaya pendidikan (unit cost) per siswa sebesar Rp.6.683.151,86 serta satuan biaya lulusan persiswa Rp. 19.082.529,-. Kalau dibandingkan dengan unit cost per siswa tahun 2009/2010 sebesar Rp.5.555.545,12 terjadi kenaikan 20,30%. Dampak dari kenaikan ini berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan sebesar 31,98%
2. Biaya pribadi siswa SMA Negeri 1 Sukawati diperuntukkan biaya pribadi langsung pembelajaran 23,64% (biaya les diluar sekolah 14,52 %, biaya bukui/LKS 5,59% dan alat tulis 3,53%), biaya pribadi tak langsung pembelajaran 16,90% (tas sekolah 2,58%, Sepatu 2,71%, ^pakaian seragam sekolah 4,07%, pakaian olah raga dan ekstra 2,29% serta biaya karya wisata 5,25%). Biaya pribadi pendukung kelancaran pembelajaran 59,46% (untuk biaya jajan sebesar 37,46%, selanjutnya biaya transportasi sebesar 21,41% dan sumbangan insidetil 0,59%. Jadi biaya pribadi siswa terbesar pada biaya pribadi pendukung pembelajaran, kedua biaya pribadi langsung pembelajaran, dan yang ketiga biaya pribadi tak langsung pembelajaran. Jadi perbandingan Satuan biaya pendidikan per siswa dengan biaya pribadi dalam tahun 2008/2009 sebesar Rp.6.683.151,86 sedangkan biaya pribadi persiswa Rp. 4.431.885.
 3. Penggunaan dana tahun 2009/2010 sebesar Rp.4.442.441.819 meningkat pada tahun 2010/2011 menjadi Rp. 5.157.347.900. Ini berarti ada kenaikan sebesar Rp. 1.074.993.081 atau 24,30 %. Kalau dibandingkan kenaikan biaya rata-rata per siswa sebesar Rp.5.555.545,12 untuk tahun 2009/2010 dan biaya rata-rata per siswa tahun 2010/2011 Rp.6.683.151,86 atau naik 20,30%. Dari kenaikan biaya rata-rata per siswa 20,30% ini, diharapkan memiliki dampak peningkatan pemenuhan delapan standar Nasional pendidikan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya pendidikan SMA Negeri 1 Sukawati dapat meningkatkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan
 4. Jenis satuan biaya pendidikan terbesar adalah untuk biaya personal sebesar 68,72% yang sumber dananya dari pemerintah pusat. Untuk biaya operasi non personal atau semua kegiatan sekolah dibiayai dari dana masyarakat atau orang tua murid, sehingga dapat dikatakan tanpa ada dana masyarakat tidak ada kegiatan SMA Negeri 1 Sukawati. Manfaat dana personal ini baru sebesar 64,69% dan masih dapat dioptimalkan hingga 35,31%
 5. Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara standar biaya pendidikan dengan mutu pembelajaran guru melalui persamaan garis regresi $y = 119,074 + 0,804X$ dengan $F_{reg} = 75,820$ ($p < 0,05$). Dalam penelitian ini ditemukan korelasi positif yang signifikan antara standar biaya pendidikan dengan mutu pembelajaran guru sebesar 0,729 dengan $p < 0,05$. Hal ini berarti makin tinggi pembiayaan pendidikan, makin baik mutu pembelajaran guru. Variabel standar biaya pendidikan dapat menjelaskan makin tingginya mutu pembelajaran guru sebesar 53,10%.
- Beberapa implikasi praktis yang dapat dikembangkan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Sumber dana pada SMA Negeri 1 Sukawati paling besar berasal dari Pemerintah Pusat, ke dua dari

masyarakat dan yang terkecil dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Sukawati masih mengandalkan sumber dana dari Pemerintah Pusat untuk biaya personal, dana masyarakat sebagai sumber andalan dalam pemenuhan standar pendidikan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan melalui kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah dan mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pencapaian standar nasional pendidikan 100%.

2. Secara empirik menunjukkan bahwa standar biaya pendidikan berkorelasi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran guru. Untuk itu, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan biaya pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati adalah: (1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, (2) mengadakan sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat, (3) menggali sumber daya lain dengan jalan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gianyar, dan (4) peran masyarakat yang terwadahi dalam komite sekolah maupun paguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk membantu kelancaran proses pembelajaran.
3. Berdasarkan hasil analisis tentang pemenuhan standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati, ditemukan bahwa :
 - (1) Standar isi dan standar kompetensi lulusan, dalam hal ini sudah sesuai dengan tujuan standar pendidikan. Dimana sudah memiliki dokumen sekolah berupa KTSP dan silabus.
 - (2) Standar proses, dalam hal ini ketercapaian yang paling minimal. Dalam hal ini masih kurangnya budaya ,membaca dan menulis. Untuk

itu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pencapaian yang lebih tinggi: mengirim guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, workshop, dan seminar, mengadakan sosialisasi hasil pelatihan dan berbagai kebijakan pemerintah dengan mendatangkan narasumber, dan MGMP merupakan wadah bagi guru untuk bekerjasama mengatasi berbagai kesulitan dan meningkatkan kompetensi.

- (3) Standar pendidik dan tenaga kependidikan mendorong guru untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah, mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju, mengirim guru untuk magang ke sekolah lain, memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi.
- (4) Standar sarana dan prasarana melengkapi sarana dan berbagai media penunjang kegiatan pembelajaran, dimana perlunya setiap kelas ada LCD.
- (5) Standar pengelolaan Dalam hal ini sudah bagus, tetapi peranan alumni perlu diikuti sertakan untuk mendukung pelaksanaan program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, memberikan keteladanan, dorongan, dan menggugah hati nurani guru agar menyadari akan tugas dan tanggungjawab sebagai guru
- (6) Standar Pembiayaan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan melalui kerjasama yang baik antara sekolah dengan komite sekolah dan mengajukan proposal kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pencapaian standar nasional pendidikan 100%. meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapatan yang bersumber dari komite sekolah dan orangtua siswa.
- (7) Standar Penilaian Pendidikan. Sudah dilaksanakan dengan adanya penilaian semesteran dalam hal ini sudah maksimal.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa standar pembiayaan pendidikan berkorelasi secara signifikan terhadap mutu pembelajaran guru SMANegeri 1 Sukawati. Selain itu telah ditemukan tentang besaran biaya pendidikan dan besaran biaya pendidikan persiswa, serta pembuktian dalil bahwa peningkatan biaya pendidikan terjadi peningkatan pencapaian standar nasional pendidikan. Dengan disarakan beberapa hal sebagai berikut kepada:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar dalam menetapkan kebijakan dalam merancang anggaran pendidikan ke depan dan landasan dalam memprediksi besarnya biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional sekolah secara efektif dan efisien.

2. Kepala SMA Negeri 1 Sukawati

Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah SMA Negeri 1 Sukawati adalah (1) menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menyusun anggaran ke depan dalam upaya peningkatan pencapaian standar nasional pendidikan dan mutu pembelajaran, (2) mensosialisasikan hasil penelitian kepada komite sekolah dalam rangka penyusunan RAPBS, (3) meningkatkan pembiayaan pendidikan secara perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan (4) menjadikan peningkatan mutu pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

4. Komite SMA Negeri 1 Sukawati

Secara empirik ditemukan standar pembiayaan pendidikan berkontribusi secara signifikan terhadap mutu pembelajaran guru SMA Negeri 1 Sukawati. Untuk itu, dukungan masyarakat yang terbentuk dalam wadah komite sekolah harus mampu: (1)

mendorong berkembangnya komitmen masyarakat terhadap kualitas pendidikan, (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, (3) menampung, menganalisis ide, aspirasi berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, (4) memberi masukan, pertimbangan, rekomendasi pada sekolah tentang kebijakan program pendidikan, RAPBS; kriteria tenaga kependidikan, fasilitas sekolah; dan kinerja satuan pendidikan, (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, (6) menggalang dana masyarakat untuk kualitas layanan pendidikan, dan (7) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Engkoswara, H, Prof DR, 2010, *Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung*

Fattah, Nanang, 2000, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Provinsi Bali Tahun 2005, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Ganesha, Singaraja.

Rusdarti, Anas, 2001, *Pembiayaan Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Konaspi, Semarang.*

Supriadi, Dedi, 2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah, Remaja Rosdakarya, Bandung.*

Sudarwan Danin Prof.Dr, 2005 *Visi Baru*
Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga
Akademik 2005, Penerbit Bumi Aksara,
Jakarta